

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era milenial saat ini telah menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dunia. Perubahan dari era sebelumnya untuk saat ini jauh lebih modern. Keterbukaan setiap negara terhadap perdagangan bebas sudah menjadi hal umum yang sudah banyak diketahui. Hal ini kemudian membuat setiap negara harus memiliki kesiapan dalam menghadapi milenial ekonomi, termasuk Indonesia dengan negara penduduk terbanyak ke-empat di dunia versi bank dunia (United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision, 2019).

Berdasarkan potensi alam serta sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia harusnya sudah mampu serta siap dalam menghadapi era ekonomi yang baru. Keberadaan Indonesia sudah dikenal sejak lama sebagai negara dengan segala potensi yang dimiliki. Kerjasama antar negara dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hasil dari kerjasama antara negara sejatinya kedua negara terpenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya, namun masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan (Tohari, & dkk 2019). Kurangnya lapangan pekerjaan memaksa masyarakat yang masih dibawah angkatan kerja untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Meskipun pendapatan perkapita Indonesia tergolong tinggi namun pendapatan salah satunya perdagangan yang dilakukan dengan cara illegal, contohnya tindakan kriminalitas dalam bentuk perampokan, pencurian, pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal sehingga mengancam keamanan masyarakat (Spiliopoulou & Antoniou, 2012). Faktor yang mempengaruhi individu atau seseorang untuk berbuat tindakan kriminalitas karena disebabkan adanya kesempatan. Kesempatan tersebut dilatarbelakangi dengan motif ingin menjadi kaya raya dan menginginkan uang atau barang yang didapatkan dengan mudah. Dampaknya mentalitas masyarakat menjadi menurun. Perilaku tersebut akan berdampak panjang kepada generasi berikutnya.

Tindakan kriminalitas, secara umum melanggar aturan hukum dan tindakan tersebut dapat terkena sanksi pidana. Hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya dikalangan pengusaha, birokrasi, perorang (*premanisme*) berdagangan terdapat tindakan pungutan liar. Pada tahun 2011 tercatat pungutan liar mencapai nominal 25 triliun dengan rata-rata pendapatan pertahunnya mencapai 27-30 triliun versi kementerian perindustrian. Porsi biaya pungutan liar terhadap biaya produksi perusahaan mencapai 20 persen sehingga perlu adanya biaya ekstra untuk memperlancar distribusi produksi (Katinga, 2012). Pungutan liar saat ini seakan sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menginginkan hidup serba kemudahan tanpa perlu disertai adanya usaha sehingga produktivitas masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi akhirnya tidak seimbang akibat

sifat-sifat yang kurang tepat seperti malas, minimnya etos kerja dan masih banyak lagi. Akibat dari budaya yang sudah mengakar sejak dahulu membuat mental produktivitas masyarakat dari kalangan orang tua sampai anak muda menjadi sangat rendah. Imbas makro dari sifat dan budaya pungutan liar kepada penurunan kinerja ekonomi dan negara tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan negara. Secara perhitungan matematis menjelaskan bahwa $P.MP_L = W$ yang artinya produktivitas akan menghasilkan upah sesuai kontribusi produktivitas yang dihasilkan. (Mankiw, 2012). Contohnya adalah besaran kontribusi karyawan biasa (supir) berbeda dengan kontribusi direktur disuatu perusahaan, hal yang mendasar dari perhitungan tersebut karena penguasaan bidang pekerjaan sehingga upah yang diberikan oleh pihak perusahaan akan lebih besar kepada direktur.

Di sisi lain tindakan pungutan liar dalam pandangan perusahaan adalah suatu kondisi yang dapat menurunkan tingkat produktivitas serta menurunkan laba perusahaan. Tindakan pungutan liar harga-harga meningkat karena dari biayanya yang terus meningkat (Antonescu, 2012). Pada akhirnya dengan harga yang tinggi imbas terakhir yaitu kepada konsumen. Secara tidak langsung kebutuhan barang akan semakin berkurang ketika pendapatan yang dibelanjakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh sederhana pendapatan seorang karyawan satu bulan sebesar Rp 4.000.000,- dengan pendapatan tersebut bisa membeli segala kebutuhan barang untuk satu bulan kedepan dan sisa dari pendapatan tersebut masih dapat ditabungkan, namun kondisi yang berbeda terjadi dengan harga-harga barang naik

maka kebutuhan karyawan tersebut hanya bisa memenuhi untuk kebutuhan satu bulan tanpa bisa menabung untuk kebutuhan lainnya. Berdasarkan contoh diatas memperlihatkan bahwa imbas pungli terhadap perekonomian menurunkan daya beli masyarakat kesejahteraan menurun akibat kurangnya kebutuhan untuk sehari-hari.

Minimnya pendapatan yang dihasilkan, secara psikologis akan membuat pekerja mencari tambahan penghasilan baik yang dilakukan secara legal maupun illegal. Tambahan penghasilan tersebut biasanya akan mempengaruhi kinerja dari pekerja sehingga pekerja bisa menjadi lebih produktif atau bahkan tidak lagi produktif dan hal itu akan merugikan perusahaan secara biaya. Perusahaan akan mengambil keputusan untuk mempertahankan labanya dengan cara mengurangi biaya-biaya produksi termasuk biaya mengaji karyawan. Cara seperti itu dinilai sangat efektif dalam meningkatkan keuntungan (Zaman, & dkk 2012). Belum ada cara yang pasti perusahaan menghindari adanya pungutan liar dijalanan atau didaerah perusahaan, karena pungutan liar terjadi akibat terbentuknya oknum-oknum dan membuka peluang terbentuknya kelompok jaringan premanisme. Motif-motif adanya pungutan liar biasanya terbentuk sebagai organisasi masyarakat yang mengatur jalan, keamanan daerah, birokrasi pemerintah, pengusaha, karyawan di perusahaan-perusahaan swasta.

Sikap pembiaran dari masyarakat dan kenyamanan masyarakat dengan kondisi tersebut akhirnya jaringan premanisme semakin membesar. Aktivitas pungutan liar biasanya berada dititik strategis yang dimana titik-titik itu adalah daerah dari kekuasaan oknum pungutan liar. Proses terbentuknya jaringan pungutan liar serta

premanisme tidak hanya dari sikap pembiaran masyarakat tetapi dari lingkungan. Pembicaraan dari mulut ke mulut dengan motif memberi pekerjaan sehingga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan langsung tertarik untuk ikut serta dengan tawaran tersebut. Motif yang lain hubungan pertemanan diantara oknum tersebut membentuk ikatan emosional yang akhirnya kelompok tersebut melakukan tindakan pungutan liar secara terorganisir. Kelompok aktivitas pungutan liar membuat jalur-jalur jalanan menjadi terganggu terlebih kepada jalur pengiriman barang. Gangguan yang sering terjadi terlambatnya pengiriman barang sehingga perusahaan mengalami kerugian pendapatan (Juniati, 2017).

Perilaku dari masyarakat tersebut membuat kesehatan dari perekonomian dapat terganggu secara parsial dengan berbagai dampak ekonomis seperti harga-harga barang yang meningkat, turunnya produktivitas masyarakat sampai minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut menjadi persoalan serius yang harus ditangani, baik dari masyarakat dan juga petugas negara menindak seluruh jaringan kelompok ini. Di sisi lain jaringan pungutan liar terbentuk tidak hanya campur tangan ormas ataupun hubungan pertemanan lainnya tetapi adanya campur tangan aparatur negara yang membuat mafia-mafia bergerak secara terorganisir dengan baik. Permasalahan diatas juga dijelaskan dalam penelitian (Purwadi, & dkk 2018) yang menyatakan bahwa ormas di Jawa Barat dapat bergerak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan pemerintah daerah dan juga banyak oknum perangkat-perangkat negara yang ikut serta atas organisasi illegal tersebut.

Pemanfaatan jabatan yang sering kali terjadi dikalangan masyarakat membuat jaringan kelompok premanisme sangat sulit untuk dibrantas. Akibatnya peluang-peluang ini yang kemudian dijadikan lahan bisnis untuk sebagai orang yang mengambil keuntungan-keuntungan secara illegal. Keuntungan illegal ini terus dilakukan seiring dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan dan tidak pula antar oknum saling bersinggungan terhadap daerah kekuasaan (Rahmatulloh, 2017). Jaringan kelompok premanisme sejatinya diatur bukan hanya dari organisasi masyarakat (mafia) tetapi jaringan aparaturnegara bermain dalam lingkaran hitam tersebut.

Penyalahgunaan pekerjaan menjadi budaya selanjutnya yang tertanam di masyarakat selain budaya pungli. Begitu kompleks permasalahan pungutan liar serta seluruh jaringan yang terbentuk. Mayoritas kelompok-kelompok ini sudah terdaftar sebagai ormas yang legal berdiri sehingga pembubaran sulit dilakukan (Zakariya, & dkk 2019). Oleh sebab itu, segala tindakan kriminalitas yang terjadi sampai dengan terbentuknya seluruh jaringan premanisme yang melakukan aktivitas pungutan liar sebagai lahan keuntungan pribadi menjadi tugas pemerintah membangun mentalitas masyarakat menjadi lebih produktif sehingga pembagian kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan segala runtutan kejadian adanya pungutan liar peneliti mencoba menguraikan seluruh permasalahan yang ada, karena pembentukan jaringan kelompok premanisme sampai kepada dampak ekonomis yang tercipta menjadi tugas pemerintah

dan seluruh lapisan masyarakat untuk menghilangkan permasalahan mendasar yakni sikap serta mentalitas kurang produktif. Latar belakang diatas peneliti menuliskan judul tentang **“Analisis Pengaruh Aktivitas Pungutan Liar terhadap Ongkos Angkut Transportasi Truk Ekspedisi Barang (Study Kasus PT. Roda Mustika Jaya Tbk)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditemukannya beberapa masalah dan masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa point diantaranya :

1. Apakah hubungan pungutan liar terhadap pembentukan perilaku supir pada saat pengiriman ?
2. Apakah pengaruh pungutan liar terhadap kenaikan ongkos transportasi di wilayah Jabodetabek ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan aktivitas pungutan liar terhadap pembentukan perilaku supir pada saat pengiriman
2. Untuk menganalisis serta indentifikasi permasalahan pengaruh pungutan liar terhadap kenaikan ongkos transportasi dan fenomena kenaikan harga barang-barang di wilayah Jabodetabek

1.4 Manfaat Penelitian

Pertama manfaat bagi penulis, penelitian ini ditujukan untuk semua mahasiswa dalam rangka peningkatan keilmuan. Penelitian ini sebagai bentuk dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana banyak mengutip pemikiran-pemikiran penulis lainnya., sehingga penelitian yang diteliti dapat membuat pondasi kuat untuk melanjutkan menjadi sebuah pemikiran berkesinambungan. Harapan dari penelitian ini bagi para pembaca bisa memberikan saran dan kritik terhadap komponen-komponen dasar keilmuan yang perlu ditambahkan, sehingga penelitian ini dapat diperbaiki atau ditambahkan melalui inovasi serta kreatifitas keilmuan.

Kedua bagi dunia pendidikan, penelitian yang diteliti bertujuan untuk meningkatkan dunia pendidikan nasional, agar pendidikan nasional yang dibangun oleh para pemikir bangsa dapat terwariskan secara menyeluruh. Pendidikan juga memberikan gambaran bahwa adanya kehidupan masyarakat sosial yang berintelektual yang hidup dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini disajikan untuk dunia pendidikan agar semua lapisan masyarakat dapat melihat perbedaan pendapat sebagai sesuatu pertukaran pikiran yang menghasilkan output diskusi yang merupakan bentuk penelitian.

Ketiga untuk jajaran pemerintah, penelitian ini dilakukan untuk melihat realitas yang terjadi pada masyarakat lokal Indonesia. Bidang transportasi darat menjadi perhatian penting saat ini, karena hal tersebut menjadi bidang fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pemerataan harga disetiap daerah. Pemerataan harga yang dilakukan menimbulkan pro dan kontra yang terjadi akibat

banyaknya praktek pramanisme yang terjadi sehingga pungutan liar sangat membuat masyarakat khususnya supir truk menjadi terganggu aktivitas pengiriman barang. Disisi lain pengiriman barang yang dilakukan akan mengurangi pendapatan dari supir akibat harus membayar uang keamanan hal tersebut dilakukan secara illegal, oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan kepentingan kecil masyarakat daripada kepentingan suatu kelompok.

